



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 57/ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 121 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 121) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

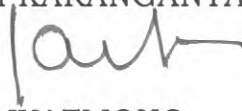
4. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Juli 2018
BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 51

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 1 | PENDAPATAN | 2.064.143.269.000,00 | 2.064.143.269.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 317.469.444.000,00 | 317.469.444.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 136.000.000.000,00 | 136.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 23.162.915.000,00 | 23.162.915.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13.054.053.000,00 | 13.054.053.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 145.252.476.000,00 | 145.252.476.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | 1.347.443.404.000,00 | 1.347.443.404.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 36.500.435.000,00 | 36.500.435.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 978.664.650.000,00 | 978.664.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 332.278.319.000,00 | 332.278.319.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 399.230.421.000,00 | 399.230.421.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 77.660.600.000,00 | 77.660.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 103.533.194.000,00 | 103.533.194.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 207.089.437.000,00 | 207.089.437.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya | 10.947.190.000,00 | 10.947.190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | BELANJA | 2.182.232.154.000,00 | 2.183.974.654.000,00 | 1.742.500.000,00 | 0,08 |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.432.963.250.000,00 | 1.434.705.750.000,00 | 1.742.500.000,00 | 0,12 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.032.868.204.000,00 | 1.034.610.704.000,00 | 1.742.500.000,00 | 0,17 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 82.315.056.000,00 | 82.315.056.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 4.625.000.000,00 | 4.625.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 15.916.292.000,00 | 15.916.292.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 294.738.698.000,00 | 294.738.698.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4 - 3 | 6 |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 2.500.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 749.268.904.000,00 | 749.268.904.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 30.220.197.100,00 | 30.220.197.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 457.849.929.098,00 | 457.849.929.098,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 261.198.777.802,00 | 261.198.777.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (118.088.885.000,00) | (119.831.385.000,00) | (1.742.500.000,00) | 1,48 |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 128.088.885.000,00 | 129.831.385.000,00 | 1.742.500.000,00 | 1,36 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 128.088.885.000,00 | 129.831.385.000,00 | 1.742.500.000,00 | 1,36 |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 118.088.885.000,00 | 119.831.385.000,00 | 1.742.500.000,00 | 1,48 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Karanganyar,

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Printed By Sim06


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 57 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
 KARANGANYAR NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01 Dinas Kesehatan

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4 | PENDAPATAN | 5.454.000.000,00 | 5.454.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5 | BELANJA | 119.901.723.000,00 | 119.901.723.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 59.206.556.000,00 | 59.206.556.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 60.695.167.000,00 | 60.695.167.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 840.000.000,00 | 840.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01.01 | <i>Penyediaan jasa surat menyurat</i> | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01.02 | <i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i> | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01 | Belanja Telepon | 63.000.000,00 | 35.000.000,00 | (28.000.000,00) | (44,44) | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02 | Belanja Air | 102.000.000,00 | 17.000.000,00 | (85.000.000,00) | (83,33) | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03 | Belanja Listrik | 233.800.000,00 | 346.800.000,00 | 113.000.000,00 | 48,33 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.05 | Belanja Surat Kabar/Majalah | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01.08 | <i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i> | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01.10 | <i>Penyediaan alat tulis kantor</i> | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01.11 | <i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i> | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01.17 | <i>Penyediaan makanan dan minuman</i> | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01.18 | <i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i> | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 01.35 | <i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i> | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.02.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.635.000.000,00 | 1.635.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------|------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03 | Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | 8.349.750.000,00 | 11.269.500.000,00 | 2.919.750.000,00 | 34,97 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03.01 | Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD | 4.965.250.000,00 | 5.670.000.000,00 | 704.750.000,00 | 14,19 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03.04 | Tunjangan Reses | 945.000.000,00 | 1.417.500.000,00 | 472.500.000,00 | 50,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03.05 | Tunjangan Transportasi | 2.439.500.000,00 | 4.182.000.000,00 | 1.742.500.000,00 | 71,43 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (16.324.059.000,00) | (19.566.644.000,00) | (3.242.585.000,00) | 19,86 | |
| Karanganyar, | | | | | | |
| BUPATI KARANGANYAR, | | | | | | |
|  | | | | | | |
| JULIYATMONO | | | | | | |
| PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 4.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | | | | | | |

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 51 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
 KARANGANYAR NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD

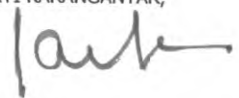
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
 Organisasi : 4.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.01.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------|------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5 | BELANJA | 16.324.059.000,00 | 18.066.559.000,00 | 1.742.500.000,00 | 10,67 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 16.324.059.000,00 | 18.066.559.000,00 | 1.742.500.000,00 | 10,67 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 | <i>Non Kegiatan</i> | 16.324.059.000,00 | 18.066.559.000,00 | 1.742.500.000,00 | 10,67 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1 | Belanja Pegawai | 16.324.059.000,00 | 18.066.559.000,00 | 1.742.500.000,00 | 10,67 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 7.974.309.000,00 | 7.974.309.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS/Uang Representasi | 932.295.000,00 | 932.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 120.906.200,00 | 120.906.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 1.351.827.750,00 | 1.351.827.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 145.226.000,00 | 145.226.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 194.179.310,00 | 194.179.310,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 4.476,00 | 4.476,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09 | Iuran BPJS Kesehatan | 47.347.536,00 | 47.347.536,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.10 | Uang Paket | 86.058.000,00 | 86.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.11 | Tunjangan Badan Musyawarah | 29.414.700,00 | 29.414.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.12 | Tunjangan Komisi | 55.906.200,00 | 55.906.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.13 | Tunjangan Badan Anggaran | 34.895.700,00 | 34.895.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.14 | Tunjangan Badan Kehormatan | 7.856.100,00 | 7.856.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.15 | Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya | 241.000.000,00 | 241.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.16 | Tunjangan Perumahan | 4.320.000.000,00 | 4.320.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.18 | Uang Jasa Pengabdian | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.19 | Tunjangan Hari Raya Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD | 247.416.750,00 | 247.416.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21 | Tunjangan Badan Legislasi Daerah | 16.991.100,00 | 16.991.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22 | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | 7.992.972,00 | 7.992.972,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23 | Iuran Jaminan Kematian (JKM) | 9.991.206,00 | 9.991.206,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------|------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03 | Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | 8.349.750.000,00 | 10.092.250.000,00 | 1.742.500.000,00 | 20,87 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03.01 | Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD | 4.965.250.000,00 | 4.965.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03.04 | Tunjangan Reses | 945.000.000,00 | 945.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.01 . 4.01.01 . 00.00 . 5.1.1.03.05 | Tunjangan Transportasi | 2.439.500.000,00 | 4.182.000.000,00 | 1.742.500.000,00 | 71,43 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (16.324.059.000,00) | (18.066.559.000,00) | (1.742.500.000,00) | 10,67 | |

Karanganyar,

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 4.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Printed by SimDa



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
 Organisasi : 4.04.05 Badan Keuangan Daerah
 Sub Unit Organisasi : 4.04.05.01 Badan Keuangan Daerah (PPKD)

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|-------|------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 4 | PENDAPATAN | 1.764.421.466.000,00 | 1.764.421.466.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 5 | BELANJA | 400.095.046.000,00 | 400.095.046.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 1.364.326.420.000,00 | 1.364.326.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | | |
| 4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 128.088.885.000,00 | 129.831.385.000,00 | 1.742.500.000,00 | 2,53 | |
| 4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 128.088.885.000,00 | 129.831.385.000,00 | 1.742.500.000,00 | 2,53 | |
| 4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.01 | Pelampauan Penerimaan PAD | 51.044.500.000,00 | 51.044.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.04 | Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya | 77.044.385.000,00 | 78.786.885.000,00 | 1.742.500.000,00 | 4,21 | |
| 4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.04.01 | Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung | 21.000.000.000,00 | 21.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.04.02 | Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung | 525.000.000,00 | 525.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.04.03 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000.000,00 | 26.742.500.000,00 | 1.742.500.000,00 | 12,97 | |
| 4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.04.04 | Belanja Modal | 30.519.385.000,00 | 30.519.385.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 118.088.885.000,00 | 119.831.385.000,00 | 1.742.500.000,00 | 2,75 | |

Karanganyar,

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO